



**PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGEPOSARI
KAPANEWON SEMANU KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGEPOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengalokasian Dana Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);
 20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang

- Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
 23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan tentang Standar Harga Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
 25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
 26. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2018 Nomor 9);
 27. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 4);
 28. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintah Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 5);
 29. Peraturan Desa Ngeposari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngeposari Tahun 2019 Nomor 10);
 31. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2020 Nomor 8);
 32. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Kalurahan Ngeposari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngeposari Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGEPOSARI
dan
LURAH NGEPOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp.	3.154.577.800,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	<u>3.361.413.452,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(206.835.652,00)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	256.835.652,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	206.835.652,00
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngeposari.

Ditetapkan di : Ngeposari
pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di Ngeposari
pada tanggal 29 Desember 2023

GARIK,

ALIFTA ZULAIKHA, S.Pd.
LEMBARAN KALURAHAN NGEPOSARI TAHUN 2023 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

Sal APBDes : APBDes Awal

CODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.062.175.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.802.500,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.154.577.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.094.551.016,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	787.270.991,00	
5.3.	Belanja Modal	1.381.591.445,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	98.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.361.413.452,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(206.835.652,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	256.835.652,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	256.835.652,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	206.835.652,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngeposari, 29 December 2023



LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
 NOMOR 4 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI
 TAHUN ANGGARAN 2024

is APBDes : APBDes Awal

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	75.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.062.175.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	16.802.500,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.154.577.800,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.607.057.507,00</u>	
1	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.263.333.057,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	926.552.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	926.552.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	60.950.496,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	60.950.496,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	73.840.041,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.840.041,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.800.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.642.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.642.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	46.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	223.315.900,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	32.565.900,00	PBK
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.565.900,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	158.500.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	158.500.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	14.000.000,00	PBH
2.90	5.3.	Belanja Modal	14.000.000,00	
2.91		Pengadaan Mebel	13.000.000,00	ADD
2.91	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.550.000,00	DLL
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.550.000,00	
2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.700.000,00	PBH
2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.467.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	33.680.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.680.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	14.187.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.187.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	550.000,00	DLL
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.550.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	51.941.550,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.600.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.600.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8.966.550,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.966.550,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.260.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.260.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.880.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.835.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.600.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PAD

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.000.000,00	PAD
5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.384.890.445,00</u>	
1.1.		Sub Bidang Pendidikan	194.655.000,00	
1.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	72.130.000,00	DDS
1.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.130.000,00	
1.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	122.525.000,00	DDS
1.1.07	5.3.	Belanja Modal	122.525.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	167.120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12.500.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	17.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.200.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	10.200.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	33.300.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.300.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	73.920.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.920.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.989.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	279.843.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	279.843.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	184.291.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	184.291.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	111.855.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	111.855.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	25.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	22.700.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	22.700.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.700.000,00	

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	5.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	394.426.445,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M lilik **)	182.459.445,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	182.459.445,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	33.967.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.967.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	3.000.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	175.000.000,00	PBP
2.8.99	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>51.585.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3.310.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.310.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.310.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.000.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	2.000.000,00	PAD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.800.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	4.800.000,00	PAD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	41.475.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	26.800.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	6.075.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.075.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	3.920.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.920.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.680.000,00	PAD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.680.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>219.880.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.602.500,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	16.602.500,00	DDS, DLL
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.602.500,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	29.250.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	20.000.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	9.250.000,00	DLL
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.250.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.560.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	3.660.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	4.400.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	11.500.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	6.000.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	6.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	148.468.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	137.068.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	134.618.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	11.400.000,00	PAD
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>98.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	8.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.361.413.452,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(206.835.652,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	256.835.652,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	206.835.652,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAHA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



29 December 2023



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON SEMANU
PEMERINTAH KALURAHAN NGEPOSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦱꦼꦩꦤꦸꦥꦼꦩꦸꦂꦠꦤ꧀ꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦺꦥꦺꦱꦂꦶ

Jalan Wonosari - Baran KM 09 Nomor 100, Ngeposari, Semanu, Gunungkidul
Kode Pos : 55893 email : kalurahanngeposari@gmail.com website : ngeposari-semanu.desa.id

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGEPOSARI
DAN LURAH NGEPOSARI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGEPOSARI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : 4 / BA / XII / 2023

Pada hari ini **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh Sembilan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, Bertempat di Balai Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Pada Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngeposari **Menyepakati Bersama** terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024** untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

Naskah Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir

Demikian Kesepakatan bersama ini dibuat di Ngeposari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah Ngeposari

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngeposari



DAFTAR HADIR

Hari : Jum'at

Tanggal : 29 Desember 2023

Tempat : Balai Kalurahan Ngeposari

Acara : Penetapan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2024

No	Nama	Jabatan	Alamat	TTD
1	Cipta	lurah	Ngepos	1
2	Supriyaton	Ulu-ulu	Ngepos	2
3	Sutarwa	Bamuskal	Sinulul	3
4	TUPARYONTO	Bamuskal	ngaglik	4
5	Sumarni	Bamuskal	KB. Wetan	5
6	DWI KRISWANTO	Bamuskal	KB LOR A	6
7	Ngateno	Bamuskal	KB. Kulon	7
8	Sutopo	Bamuskal	Ngepos	8
9	Harjuna	Bamuskal	Weduras	9
10	Sutiyono	Kamituwa	Ngaglik	10
11	Rahmat Maulana	Tata Laksana	Ngepos	11
12	Ahmad Mulyono	Paguyuban	KB. Kulon	12
13	Ahmad Zulaiqin	Carik	sem. lu-	13
14	Setyaningrum	Danarata	Mojo	14
15	Pintan Adu-z	Staf	KB. Wetan	15
16	ASTUTI BUDIHININGRUM	JAGABAYA	KB KULON	16
17	Atik Dwi W	Staf	KB LOR B	17
18	Afni Kurniasari	Staf.	NGEPOS.	18
19	Slamet Dwi N.	staf	KEBLAK	19
20				20
21				21

